

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang.**

Indonesia adalah negara berkembang yang dalam pembangunannya masih mengalami masalah akan masih tingginya angka pengangguran. Memang berdasarkan data dari Badan Pusat statistik Nasional dapat dilihat data bahwa disaat jumlah angkatan kerja bertambah naik 2,39 juta dibanding jumlah angkatan kerja pada Februari tahun 2017 angka pengangguran pada tahun 2018 berhasil diturunkan sebanyak 140 ribu orang<sup>1</sup>, tapi bila dilihat dari data tingkat pengangguran terbuka yang diklasifikasikan menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan sebagaimana yang peneliti paparkan pada gambar 1.1, dapat dilihat, pendidikan lulusan diploma dan universitas makin banyak yang tidak bekerja dan hal ini mengindikasikan adanya permasalahan akan rendahnya kualitas masyarakat tenaga kerja terdidik di Indonesia.

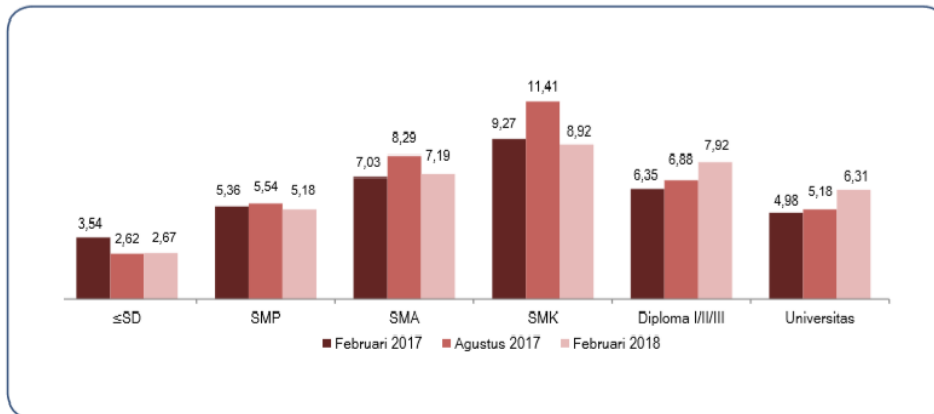


---

<sup>1</sup> [www.bps.co.id](http://www.bps.co.id) diakses pada tanggal 17 Februari 2019 pada pukul 08:44 WIB

Gambar 1.1

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2018

Masalah pengangguran yang disebabkan oleh rendahnya kualitas masyarakat tenaga kerja terdidik merupakan masalah nasional yang perlu diselesaikan secara terpadu baik di pusat, provinsi, ataupun di daerah kabupaten/kota. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pelayanan pelatihan kerja yakni mengadakan pendidikan informal berupa kegiatan pelatihan keterampilan yang dapat membekali masyarakat dengan berbagai keterampilan yang dibutuhkan oleh penyedia lapangan kerja. Untuk menciptakan terselenggaranya upaya pelayanan tenaga kerja yang terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, maka pemerintah pusat dalam hal ini menerbitkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, yang kemudian diikuti oleh kebijakan turunannya berupa berbagai peraturan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi berbagai peraturan daerah di pemerintahan provinsi maupun kabupaten kota, dan ada juga kebijakan turunan berupa program yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi maupun

pemerintah kabupaten/kota dalam rangka peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja didaerahnya masing-masing.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK) adalah pilihan langkah yang diambil oleh pemerintah daerah kabupaten Sijunjung untuk menyelenggarakan kebijakan sistem pelatihan kerja nasional di daerah sebagaimana yang ditetapkan oleh pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dan untuk melaksanakan tugasnya dalam pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan sebagaimana yang ditetapkan oleh pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Program PKPTK ini juga adalah sebuah kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung yang lahir karena adanya tuntutan publik untuk mengatasi permasalahan strategis di daerah yang mengganggu proses pembangunan yakni berupa “masih relatif tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan dan keahlian masyarakat untuk membuka dan mendapatkan lapangan pekerjaan”

Masalah akan masih tingginya angka pengangguran di kabupaten Sijunjung pada dasarnya dilatarbelakangi oleh fenomena yang serupa secara nasional yakni masalah pengangguran yang disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga kerja terdidik. Apabila dilihat dari data angka pengangguran yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan yang peneliti dapat dari Badan Pusat Statistik, dapat dilihat fenomena jumlah pengangguran yang didominasi oleh yang mempunyai latar belakang pendidikan. Menurut data BPS jumlah masyarakat pengangguran yang ada di kabupaten Sijunjung pada tahun 2018 sebanyak 3.511 orang, didominasi oleh mereka dengan latar belakang tingkat

pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 1053 orang. Kemudian diikuti oleh pengangguran dengan latar belakang tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Universitas, dan kemudian Sekolah Dasar (SD).

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Angka Pengangguran Kabupaten Sijunjung Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Tahun 2015-2017**

No	Tingkat Pendidikan	Pengangguran di Tahun		
		2016	2017	2018
1	Tidak / Belum pernah sekolah atau Tidak / Belum tamat SD	784	208	-
2	Sekolah Dasar	957	1298	321
3	Sekolah Menengah Pertama	505	365	653
4	Sekolah Menengah Atas	1207	890	1.005
5	Sekolah Menengah Kejuruan	263	626	1.053
6	Diploma I/II/III	-	-	-
7	Universitas	828	191	479
	<b>Total</b>	<b>4544</b>	<b>3578</b>	<b>3511</b>

\*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung, Olahan peneliti tahun 2019

Pemerintah memandang fenomena ini terjadi dikarenakan semakin ketatnya persaingan di dunia kerja, sehingga masyarakat dengan status pendidikan yang cukup seperti tamatan Universitas ataupun SMK masih berpotensi menjadi pengangguran apabila tidak dibekali dengan keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja. Seperti yang disampaikan oleh Kabid Penempatan

dan Penyebarluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans kabupaten Sijunjung berikut:<sup>2</sup>

“... banyaknya tamatan universitas SMK dan SMA serta Universitas yang menganggur seperti sekarang ini dikarenakan persaingan dunia kerja yang semakin ketat, ...oleh karena itu lah perlu ada upaya dari Dinas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka yang tamatan SMK dan SMA serta Universitas khususnya mereka yang ingin berkompetisi dalam dunia kerja...”

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Disnakertrans dalam upaya mendorong terjadinya peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja yang nantinya dapat berdampak kepada meningkatnya kesempatan tenaga kerja untuk dapat memperoleh pekerjaan di dunia kerja atau membuka usaha. sebagaimana yang disampaikan oleh Kabid Penempatan dan Penyebarluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans kabupaten Sijunjung berikut:<sup>3</sup>

“... sebagaimana yang adik lihat di sini (RPJMD Perubahan Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2021) arah kebijakan yang ingin dicapai itu yakni peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja sebagai pelaksanaan dari strategi meningkatkan kesempatan kerja ...”

Berkaitan dengan aturan bagaimana pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja ini pihak Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung mengatakan bahwa untuk saat ini pemerintah

<sup>2</sup> Wawancara dengan kabid Penempatan dan Penyebarluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans kabupaten Sijunjung tahun 2018, Pada Rabu 11 September 2019.

<sup>3</sup> Wawancara dengan kabid Penempatan dan Penyebarluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans kabupaten Sijunjung tahun 2018, Pada Rabu 11 September 2019



daerah belum memiliki peraturan daerah yang berkenaan dengan ketenagakerjaan. Sehingga untuk pedoman pelaksanaan pelatihan kerja yang dikenal dengan Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja ini berpatokan dengan pedoman pelaksanaan sistem pelatihan kerja di daerah yang terdapat didalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional Di Daerah, Seperti yang disampaikan oleh Kabid Penempatan dan Penyebarluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans kabupaten Sijunjung berikut:<sup>4</sup>

“...aturan pelaksanaan yang harus dipahami dalam menyelenggarakan program PKPTK ini yakni Undang-undang ketenagakerjaan, peraturan pemerintah tentang Sislakernas, dan peraturan menteri tenaga kerja berkenaan pedoman penyelenggaraan Sislakernas di daerah... pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung belum berhasil merampungkan Perda tentang Ketenagakerjaan sehingga dalam pelaksanaan program PKPTK ini kami masih menjadikan aturan-aturan tadi sebagai rujukan...”

Dalam Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 poin (9) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.<sup>5</sup> Hal tersebut juga menjadi acuan dalam pelaksanaan program PKPTK yang didalamnya terdapat pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja yang dikenal dengan “kegiatan pendidikan dan pelatihan

<sup>4</sup> Wawancara dengan kabid Penempatan dan Penyebarluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans kabupaten Sijunjung tahun 2018, Pada Pada Rabu 11 September 2019

<sup>5</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

keterampilan bagi pencari kerja”, kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja ini merupakan kegiatan utama dalam pelaksanaan program PKPTK.

Dalam program PKPTK ini juga terdapat beberapa kegiatan lainnya yang tujuannya untuk menunjang kinerja UPTD BLK Kabupaten Sijunjung dalam menyelenggarakan pelatihan kerja yang efektif dan efisien. Berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang ada dalam program PKPTK ini, dapat kita lihat pada Rencana Strategis Dinas Nakertrans Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021, yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Kegiatan pembangunan balai latihan kerja.
- 2) Kegiatan pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja.
- 3) Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.
- 4) Kegiatan pemagangan bagi peserta pelatihan yang berprestasi.
- 5) Kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana BLK.
- 6) Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelatihan BLK.
- 7) Kegiatan koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi ketenagakerjaan.

Berkenaan dengan realisasi kegiatan-kegiatan yang ada dalam program PKPTK ini pihak Disnakertrans Kabupaten Sijunjung menjelaskan:<sup>7</sup>

“...tujuan kegiatan yang ada dalam Renstra dinas ini adalah gambaran perencanaan mengenai kegiatan apa-saja yang akan Dinas lakukan dalam masa 5 tahun pelaksanaan, dan untuk kegiatan-kegiatan tiap

<sup>6</sup> Rencana strategi Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi kabupaten Sijunjung tahun 2016-2021

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Rinaldi, Staff Bidang Perencanaan Disnakertrans Kabupaten Sijunjung, Pada Pada Rabu 11 September 2019

tahunnya itu tergantung keputusan Kepala Dinas selaku pejabat pengguna anggaran di SKPD yang keputusan tiap tahunnya dapat dilihat dari RKA masing-masing tahun anggaran...”

Bila dilihat pada dokumen rencana kegiatan anggaran yang dimiliki Disnakertrans Kabupaten Sijunjung pada tahun 2016, 2017 dan tahun 2018, dapat dilihat bahwa sepanjang tiga tahun anggaran pelaksanaan, program PKPTK ini dalam pelaksanaannya masih terdiri dari kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja, koordinasi perumusan kebijakan sinkronisasi ketenagakerjaan, kegiatan pembangunan balai latihan kerja, dan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelatihan BLK. Sedangkan kegiatan pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja, kegiatan pemagangan bagi peserta pelatihan yang berprestasi, dan kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana BLK belum ada direncanakan dan dilakukan

**Tabel 1.2**

**Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja Berdasarkan Rencana Kerja Disnakertrans Kabupaten Sijunjung Tahun 2016, 2017, 2018**

<b>Tahun pelaksanaan</b>	<b>Rincian kegiatan</b>	<b>Biaya kegiatan</b>
2016	1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja 2. Koordinasi perumusan kebijakan sinkronisasi ketenagakerjaan	1. Rp 835.170.000 2. Rp 38.779.000
	<b>Total</b>	<b>Rp 873.949.000</b>
2017	1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja 2. Koordinasi perumusan kebijakan sinkronisasi ketenagakerjaan	1. Rp 838.274.000 2. Rp 70.698.000
	<b>Total</b>	<b>Rp. 908.972.000</b>
2018	1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	1. Rp 1.669.927.000



	2. Pembangunan balai latihan kerja	2. Rp 190.970.000
	3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelatihan BLK	3. Rp 15.328.000
	<b>Total</b>	<b>Rp 1.876.225.000</b>

\*Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung

Dalam pelaksanaan program PKPTK pada tahun 2018 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan anggaran yang signifikan dari anggaran tahun sebelumnya, Peningkatan anggaran yang signifikan ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang program PKPTK ini cukup urgensi untuk ditingkatkan implementasinya. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Penempatan dan Penyebarluasan Kesempatan Kerja Kabupaten Sijunjung yang mengatakan:<sup>8</sup>

“...memang pemda memandang bahwa program PKPTK ini semakin penting untuk dilaksanakan, hal ini sebagai upaya memecahkan permasalahan yang mendasar di masyarakat yakni masalah akan rendahnya kemampuan dan keahlian yang dimiliki dalam membuka usaha dan mendapatkan lapangan kerja yang akhirnya membuatnya menjadi pengangguran ...”

Masih relatif tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan dan keahlian masyarakat untuk membuka dan mendapatkan lapangan pekerjaan memang menjadi salah satu permasalahan yang mendasar dari aspek kesejahteraan masyarakat di Sijunjung, yang hal ini dapat peneliti temukan pada RPJMD Perubahan Kabupaten Sijunjung yang menjelaskan bahwa adapun permasalahan yang mendasar dari aspek kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Wawancara dengan kabid Penempatan dan Penyebarluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans kabupaten Sijunjung tahun 2018, Pada Pada Rabu 11 September 2019

<sup>9</sup> RPJMD Perubahan Kabupaten Sijunjung 2016-2021

- a. Masih relatif rendahnya ketahanan pangan, sebab produktivitas tanaman pangan relative rendah
- b. Masih relatif rendahnya produktivitas beberapa komoditi unggulan daerah, seperti karet, kakao, kopi, dan sawit.
- c. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Sijunjung masih rendah, bahkan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2012-2015 dari 6,15% pada tahun 2012 menjadi 5,66% pada tahun 2015.
- d. *Masih relatif tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini disebabkan rendahnya kemampuan dan keahlian masyarakat untuk membuka dan mendapatkan lapangan pekerjaan.*
- e. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia kabupaten Sijunjung dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang ditandai dengan masih rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Sijunjung pada tahun 2015 IPM Kabupaten Sijunjung baru mencapai 65,30 sedangkan IPM provinsi Sumatera Barat sebesar 69,98.
- f. Belum optimalnya pembangunan kesejahteraan gender dan pemberdayaan gender yang dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPD dan IDG Kabupaten Sijunjung tahun 2015 masing-masing sebesar 92,34 dan 56,34. Angka tersebut berada dibawah IPG dan IDG Provinsi Sumatera barat yang masing-masing sebesar 94,74 dan 62,42.

Selain karena adanya permasalahan yang mendasar dari aspek kesejahteraan masyarakat berupa masih relatif tingginya angka pengangguran dan

kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan dan keahlian masyarakat untuk membuka dan mendapatkan lapangan pekerjaan, dalam aspek pelayanan umum urusan tenaga kerja juga terdapat beberapa permasalahan yang cukup menjadi perhatian pemerintah daerah diantaranya yakni:<sup>10</sup>

- a. Masih kecilnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan.
- b. Rendahnya kemampuan dan keahlian tenaga kerja
- c. Rendahnya produktivitas tenaga kerja
- d. Masih rendahnya kesempatan kerja dan kesempatan untuk berusaha

Untuk menghadapi permasalahan akan rendahnya kemampuan dan keahlian masyarakat untuk membuka dan mendapatkan lapangan pekerjaan yang berakibat pada tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang dan permasalahan-permasalahan pada pelayanan umum urusan tenaga kerja diatas yang pada akhirnya membuat pemerintah daerah mendorong SKPD Disnakertrans untuk meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan program PKPTK dengan cara meningkatkan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program PKPTK tersebut. Namun peningkatan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program PKPTK ini tidak serta merta akan meningkatkan prestasi Disnakertrans kabupaten Sijunjung dalam menyukseskan pelaksanaan program yang berakhir dengan pencapaian tujuan, karena masih banyak faktor yang nantinya dapat mempengaruhi tercapai tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan program PKPTK

---

<sup>10</sup> Ibid

nanti. Salah satunya yakni sumberdaya baik itu sumberdaya finansial berupa anggaran dan sumberdaya manusia berupa staff pegawai dan sebagainya yang dikerahkan.

Dalam agenda pembangunan daerah kabupaten Sijunjung tahun 2016-2021, pada dasarnya program PKPTK ini telah berjalan selama 3 tahun yakni dari tahun 2016-2018. Pada tahun 2016, dalam pelaksanaan program PKPTK ini dilaksanakan dengan 2 (dua) rangkaian kegiatan yakni kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang pelaksanaannya diserahkan kepada UPTD BLK Kabupaten Sijunjung selaku Unit pelaksana teknis Disnakertrans dan Lembaga Pelatihan kerja milik pemerintah daerah, dan kegiatan koordinasi perumusan kebijakan sinkronisasi ketenagakerjaan yang pelaksanaannya diserahkan kepada unit kerja seksi bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja Disnakertrans kabupaten Sijunjung. Pada tahun 2017 dalam pelaksanaannya program PKPTK ini kembali dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan layaknya tahun sebelumnya yakni kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dan kegiatan koordinasi perumusan kebijakan sinkronisasi ketenagakerjaan. Pada tahun 2018 dalam pelaksanaannya program PKPTK ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) item kegiatan yakni: kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang pelaksanaannya diserahkan kepada UPTD BLK Kabupaten Sijunjung, kegiatan pembangunan balai latihan kerja yang pelaksanaannya diserahkan kepada Kasi Bidang Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nya, dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pasca kegiatan pelatihan BLK yang pelaksanaannya



melibatkan beberapa pihak seperti Kabid Penempatan dan Penyebarluasan Kesempatan Kerja, unit kerja seksi bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, dan UPTD BLK Kabupaten Sijunjung.

Dari serangkaian kegiatan yang mana menjadi isi (content) program, kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja merupakan kegiatan pokok dari program PKPTK ini. Hal yang membuat kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja ini menjadi kegiatan pokok pada program PKPTK yakni karena program PKPTK ini dalam pelaksanaannya memiliki indikator kinerja (*outcome*) berupa “persentase pencari kerja yang telah dilatih”, jadi semakin banyak tenaga kerja yang berhasil dilatih atau semakin tinggi persentase pencari kerja yang telah di latih melalui pelaksanaan program semakin tinggi kinerja Disnakertrans dalam pelaksanaan program PKPTK ini. Namun apakah semakin banyak tenaga kerja yang berhasil dilatih akan dapat menyelesaikan permasalahan akan rendahnya kemampuan dan keahlian masyarakat untuk membuka dan mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga berdampak kepada tercapainya tujuan atau sasaran program berupa menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan. Hal itu akan tergantung pula dengan sejauhmana tingkat pelaksanaan kegiatan berhasil memberi manfaat kepada kelompok sasaran yang menjadi penerima manfaat, atau sejauhmana manfaat yang diberikan dapat berdampak kepada kehidupan kelompok sasarannya yang dalam hal ini tenaga kerja di daerah.

Pada pelaksanaan program PKPTK di tahun 2016, kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dilaksanakan dengan 15 paket pelatihan keterampilan yang terdiri dari 8 (delapan) kejuruan yakni: menjahit,



processing (tata boga), mekanik sepeda motor, drafter, operator garmen, basic office , teknisi telepon seluler, instalatir penerangan yang dengannya berhasil melatih 240 orang tenaga kerja, namun yang pada akhir berhasil bekerja dan berwirausaha ada 91 orang sisanya 149 orang masih pengangguran.

**Tabel. 1.3**

**Data Hasil Monitoring Dari Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pelatihan Pencari Kerja Oleh UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Sijunjung Tahun 2016.**

No	Jenis kejuruan	Jumlah Pelatihan (paket)	Jumlah Siswa Dan Statusnya Pasca Pelatihan		
			Total siswa (orang)	Bekerja/ wirausaha (orang)	Pengangguran (orang)
1	Menjahit	2	32	19	13
2	Processing (tata boga)	3	48	21	27
3	Mekanik sepeda motor	3	48	14	34
4	Drafter	1	16	4	12
5	Operator garmen	2	32	14	18
6	Basic office	1	16	4	12
7	Teknisi telepon seluler	2	32	11	21
8	Instalatir penerangan	1	16	4	12
	<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>240</b>	<b>91</b>	<b>149</b>

\*Sumber: UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Sijunjung, Olahan Peneliti

Pada pelaksanaan program PKPTK di tahun 2017, kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dilaksanakan dengan 19 paket pelatihan keterampilan yang terdiri dari 11 (sebelas) kejuruan yakni: menjahit, tata boga, mekanik sepeda motor, membatik, basic office, instalasi AC, instalatir penerangan, alat mesin pertanian, teknisi telepon seluler, driver, drafter yang dengannya berhasil melatih 295 orang tenaga kerja, namun yang pada akhir

berhasil bekerja dan berwirausaha ada 78 orang sisanya 217 orang masih pengangguran.

**Tabel. 1.4**

**Data Hasil Monitoring Dari Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pelatihan Pencari Kerja Oleh UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Sijunjung Tahun 2017.**

No	Jenis kejuruan	Jumlah Pelatihan (paket)	Jumlah Siswa Dan Statusnya Pasca Pelatihan		
			Total siswa (orang)	Bekerja/ wirausaha (orang)	Pengangguran (orang)
1	Menjahit	5	76	18	58
2	Tata boga	4	64	25	39
3	Mekanik sepeda motor	1	16	9	7
4	Membatik	2	32	-	32
5	Basic office	1	17	4	13
6	Instalasi AC	1	16	3	13
7	Instalatur penerangan	1	9	4	5
8	Alat mesin pertanian	1	15	1	14
9	Teknisi telepon seluler	1	16	1	15
10	Driver	1	18	5	13
11	Drafter	1	16	8	8
	<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>295</b>	<b>78</b>	<b>217</b>

\*Sumber: UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Sijunjung, Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel 1.5 dapat dilihat bahwa semakin banyak tenaga kerja yang berhasil dilatih tidak serta merta akan berdampak positif kepada semakin sedikitnya angka pengangguran. Pada tahun 2016 dari 240 tenaga kerja yang berhasil dilatih yang pada akhirnya bekerja dan berwirausaha ada 91 orang atau 37,91% orang dari total tenaga kerja yang berhasil dilatih sedangkan 149 atau 62,08% sisanya masih dalam status pengangguran. Kemudian pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja terlatih berhasil ditingkatkan dengan menambah jumlah paket

pelatihan sebanyak 4 paket namun pada akhirnya yang bekerja dan berwirausaha ada 78 orang atau 26,44% sedangkan sisanya 217 orang atau 73,56% masih dalam status pengangguran.

**Tabel 1.5**

**Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pada Tahun 2016 Dan 2017**

Tahun Pelaksanaan	Jumlah Pelatihan (paket)	Jumlah Siswa Dan Statusnya Pasca Pelatihan		
		Total siswa (orang)	Bekerja/ wirausaha (orang)	Pengangguran (orang)
2016	15	240	91	149
2017	19	295	78	217

\*Sumber: UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Sijunjung, Olahan Peneliti

Pada tahun 2018 untuk melaksanakan program PKPTK ini Disnakertrans Kabupaten Sijunjung memperoleh alokasi anggaran sebesar 1.876.225.000, alokasi anggaran ini dapat dikatakan 2 kali lebih besar dari alokasi anggaran yang didapatkan oleh Disnakertrans Kabupaten Sijunjung untuk melaksanakan program PKPTK ditahun sebelumnya yang pada tahun 2017 sebesar 908.972.000 (tabel 1.2). Sejauhmana peningkatan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program PKPTK ini akan berdampak kepada tercapainya tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan program, itu pun akan bergantung kepada kebijaksanaan Kepala Disnakertrans kabupaten Sijunjung selaku pejabat Pengguna Anggaran (PA) apakah dalam memutuskan penggunaan anggaran berhasil membuat keputusan yang tepat, dan dalam pelaksanaan setiap kegiatan pun terdapat keputusan-keputusan teknis yang akan berdampak kepada hasil pelaksanaan program. Selain karena adanya keputusan, keberhasilan implementasi juga bergantung kepada daya kemampuan staff pegawai atau sumberdaya manusia yang dikerahkan, dan

berbagai faktor internal dan eksternal lainnya yang akan mempengaruhi proses pelaksanaan program PKPTK tersebut.

Melalui RKA SKPD Disnakertrans Kabupaten Sijunjung dapat dilihat bahwa Kepala Disnakertrans pada akhirnya memutuskan untuk melaksanakan program PKPTK di tahun 2018 dengan 3 (tiga) item kegiatan diantaranya: (1) kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja dengan alokasi anggaran Rp 1.669.927.000 , (2) pembangunan balai latihan kerja dengan alokasi anggaran Rp 190.970.000, dan (3) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelatihan BLK dengan alokasi anggaran Rp 15.328.000. Melalui apa yang tertera dalam RKA SKPD Disnakertrans Kabupaten Sijunjung tersebut juga dapat dilihat bahwa Kepala Disnakertrans kabupaten Sijunjung kembali memutuskan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan pendidikan pelatihan kerja yang berarti jumlah paket pelatihan yang ada pada tahun 2018 akan lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Hal ini dibenarkan oleh Kepala UPTD BLK Kabupaten Sijunjung yang mengatakan:<sup>11</sup>

“...memang benar pada tahun 2018 Pak Kadis memutuskan untuk kembali meningkatkan jumlah paket pada kegiatan pelatihan,...jumlah paket kegiatan pelatihan meningkat hingga menjadi sekitar 50 paket ...”

Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, merupakan kegiatan yang pelaksanaannya diwujudkan dengan memberikan pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja guna meningkatkan kompetensinya sehingga dapat bersaing pada dunia kerja dimana pada tahun 2018

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Kepala UPTD BLK Kabupaten Sijunjung, pada 9 September 2019.

ini dilaksanakan sebanyak 50 paket (791 orang) dengan sumber dana 19 paket dana APBD dan 31 paket dana APBN yang diperoleh dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui UPTP BLK Padang. Dari 51 paket pelatihan yang ada 20 paket pelatihan dilaksanakan dengan pelatihan institusional atau pelatihan yang diselenggarakan di kantor UPTD BLK Kabupaten Sijunjung, 2 paket pelatihan dilaksanakan secara non institusional yang dilaksanakan di LP Muaro Sijunjung, dan sisanya 28 paket pelatihan dilaksanakan secara pelatihan keliling atau Mobile Training Unit (MTU) yang dilaksanakan di 19 nagari (desa) yang ada di Kabupaten Sijunjung seperti: Nagari Air Amo, Nagari Durian Gadang, Nagari Kamang, Nagari Koto Baru, Nagari Kumanis, Kunpar, Nagari Lubuk Tarok, Nagari Maloro, Nagari Muaro Bodi, Nagari Muaro Takung, Nagari Mundam Sakti, Nagari Palangki, Nagari Sijunjung, Nagari Silokek, Nagari Subakur, Tanjung, Nagari Tanjung Gadang, Nagari Taratak Baru, Nagari Timbulun.

**Tabel 1.6**  
**Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan**  
**Keterampilan Bagi Pencari Kerja tahun 2018**

Tahap pelaksanaan	Kejuruan	Pelaksanaan		Jumlah Peserta (orang)
		Jenis	Lokasi	
Sumber Anggaran: APBD				
Tahap I	1. Tata Boga	MTU	Nagari Mundam Sakti	16
	2. Menjahit	MTU	Nagari Palangki	16
Tahap II	3. Driver	MTU	Nagari Muaro Takung	16
	4. Driver	MTU	Nagari Muaro Takung	16
	5. Tata Boga	MTU	Nagari Mundam Sakti	16
	6. Tata Rias	MTU	Nagari Muaro Bodi	16
	7. Menjahit	MTU	Nagari Koto Baru	16
	8. Teknisi Hp	MTU	Nagari Palangki	16



	9. Tata Boga	MTU	Nagari Durian Gadang	16
	10. Tenun	MTU	Nagari Subakur	16
Tahap III	11. Menjahit	MTU	Nagari Taratak baru	16
	12. Membatik	MTU	Nagari Tanjung Gadang	16
	13. Tata Boga	MTU	Nagari Silokek	16
Tahap IV	14. Tata Boga	MTU	Nagari Palangki	16
	15. Tata Boga	MTU	Nagari Lubuk Tarok	16
	16. Tata Boga	MTU	Nagari Tanjung Gadang	16
	17. Tata Boga	MTU	Nagari Sijunjung	16
	18. Tata Boga	MTU	Nagari Durian Gadang	16
	19. Tata Boga	MTU	Nagari Durian Gadang	16
<b>Sumber Anggaran: APBN</b>				
Tahap I	1. Menjahit	Institusional	Kantor UPTD BLK	16
	2. Drafter	Institusional	Kantor UPTD BLK	16
	3. Menjahit	Institusional	Kantor UPTD BLK	16
	4. Mekanik Sepeda Motor	Institusional	Kantor UPTD BLK	16
	5. Instalasi Penerangan	Institusional	Kantor UPTD BLK	16
	6. Teknisi Telepon Seluler	Institusional	Kantor UPTD BLK	16
Tahap II	7. AC Split	Institusional	Kantor UPTD BLK	10
	8. Mekanik Sepeda Motor	Institusional	Kantor UPTD BLK	16
	9. Operator Komputer	Institusional	Kantor UPTD BLK	16
	10. Operator Komputer	Institusional	Kantor UPTD BLK	16
	11. Menjahit	Institusional	Kantor UPTD BLK	16
	12. Membatik	MTU	Nagari Kamang	16
	13. Membatik	MTU	Nagari Kunpar	16
	14. Mekanik Sepeda Motor	MTU	Nagari Maloro	13
	15. Mekanik Sepeda Motor	MTU	Nagari Tanjung Gadang	16
	16. Tenun	MTU	Nagari Sijunjung	16

Tahap III	17. Mekanik Sepeda Motor	Institusional	Kantor UPTD BLK	16
	18. Tata boga	Institusional	Kantor UPTD BLK	16
	19. Teknisi Telepon Seluler	Institusional	Kantor UPTD BLK	16
	20. Menjahit	Institusional	Kantor UPTD BLK	16
	21. Las	Institusional	Kantor UPTD BLK	16
	22. Operator Komputer	Institusional	Kantor UPTD BLK	16
	23. Membatik	MTU	Nagari Aie Amo	16
	24. Operator Komputer	MTU	Nagari Kumanis	16
	25. Operator Komputer	Institusional	Kantor UPTD BLK	16
	26. Las	Non Institusional	LP IIB Muaro Sijunjung	16
	27. AC Split	Non Institusional	LP IIB Muaro Sijunjung	16
	28. Membatik	MTU	Nagari Timbulun	16
Tahap IV	29. Tata Boga	Institusional	Kantor UPTD BLK	16
	30. Drafter	Institusional	Kantor UPTD BLK	16
	31. Operator Komputer	Institusional	Kantor UPTD BLK	16

Sumber: Olahan Peneliti, UPTD BLK Kabupaten Sijunjung 2018

Berkenaan dengan sumberdaya staff pegawai yang dimiliki oleh UPTD BLK Kabupaten Sijunjung, berdasarkan data survey awal yang peneliti peroleh UPTD BLK Kabupaten Sijunjung memiliki kondisi akan kekurangan pegawai instruktur pelatihan yang mana pada Peraturan Menteri Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Standar Balai Latihan Kerja pasal 11 poin (1), (2), dan (3) yang menjelaskan bahwa setiap BLK paling sedikit hendaknya memiliki 2 orang instruktur bagi masing-masing kejuruan yang mana dapat berasal dari pemerintah atau swasta, dan paling sedikit salah satu dari 2 orang instruktur tersebut merupakan pegawai negeri sipil pada BLK bersangkutan. Namun dari temuan data yang peneliti peroleh dari survei awal UPTD BLK Kabupaten Sijunjung

hanya memiliki 4 orang instruktur yang dimiliki secara internal organisasi sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut:

**Tabel 1.7**

**Data Instruktur pelatihan UPTD BLK Kabupaten Sijunjung tahun 2018**

No	Kejuruan	Jumlah instruktur (orang)	Nama Instruktur	Keterangan
1	Menjahit	3	• Maitusal. SH	Instruktur BLK (PNS)
			• Sumiati	Instruktur Luar BLK
			• Elni Yanti	Instruktur Luar BLK
2	mekanik sepeda motor	2	• Refendi. ST	Instruktur BLK (PNS)
			• Erdi Nandi Gazali	Instruktur Luar BLK
3	Teknisi telepon seluler	1	• Fauzi Chandra S.T	Instruktur Luar BLK
4	Instalasi penerangan	1	• Asman	Instruktur Luar BLK
5	Teknisi AC	1	• Zairul Horizon. M.pd.T	Instruktur Luar BLK
6	Operator komputer	2	• Dicky Irawan S.Kom	Instruktur BLK (Non PNS)
			• Andri Alindra S.T	Instruktur Luar BLK
7	Membatik	2	• Purwati	Instruktur Luar BLK
			• Murdi, SAP	Instruktur Luar BLK
8	Tenun	1	• Indra Yeni	Instruktur Luar BLK
9	Tata boga	2	• Aslamiah, SE	Instruktur Luar BLK
			• Cici Jhonita, Spd	Instruktur Luar BLK
10	Tata Rias	1	• Nila Juvita Sari	Instruktur Luar BLK
11	Drafter	1	• Syatria Zali. ST	Instruktur Luar BLK
12	Las	2	• Ismed Kaseno. ST	Instruktur BLK (PNS)
13	Driver	3	• Brigadir Parmiaman Simarmata	Instruktur Luar BLK
			• Brigadier Eka	Instruktur Luar BLK

			Faura	
			• Aiptu Anton Satria	Instruktur Luar BLK

Sumber: Olahan Peneliti, UPTD BLK Kabupaten Sijunjung.

Berdasarkan tabel 1.7 dapat dilihat bahwa UPTD BLK Kabupaten Sijunjung hanya memiliki 4 orang instruktur, sedangkan 18 orang lainnya merupakan instruktur luar BLK yang diambil dari tenaga profesional dan pelaku usaha. Pada tabel 1.7 juga dapat dilihat bahwa kekurangan tenaga instruktur pada kejuruan teknisi telepon seluler, instalasi penerangan, teknisi AC, tenun, tata rias, dan drafter yang menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Standar Balai Latihan Kerja hendaknya memiliki minimal 2 (dua) orang tenaga instruktur.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja didominasi oleh pelaksanaan kegiatan pemberian pelatihan secara keliling. Dan dalam survei awal peneliti juga memperoleh fenomena dari pernyataan masyarakat yang memberikan informasi bahwa pelatihan keliling atau *Mobile Training Unit* (MTU) yang diadakan oleh UPTD BLK Kabupaten Sijunjung belum sepenuhnya berhasil memberikan keterampilan yang dapat digunakan untuk membuka usaha atau mendapat lapangan kerja. sebagaimana pernyataan Resmalina lulusan kegiatan pelatihan keterampilan keliling nagari Air Amo berikut:<sup>12</sup>

*“...baapo etek dan kawan-kawan lain akan jadi pelaku usaho batik, memang iyo dengan ikuik pelatihan itu etek dan kawan-kawan bisa tahu jo alat-alat nan dipakai untuak membatik, baapo manggambar pola, caro mencanting, mewarnai pola*

<sup>12</sup> Wawancara dengan Resmalina lulusan kegiatan pelatihan keterampilan keliling kejuruan membatik nagari Aie Amo tahun 2018, pada Minggu 22 September 2019



*gambar, dan mambuek pewarna alami, cuman iyo sebatas itu sajo barunyo diantara kami belum ado nan bisa mambuek kain batik nan gambar motifnya rancak dan akan laku untuk dijual ke masyarakat lai...”*

[“...bagaimana bibi dan kawan-kawan akan jadi pelaku usaha batik, memang betul dengan ikut pelatihan membatik itu bibi dan kawan-kawan bisa tahu alat-alat yang dipakai untuak membatik, bagaimana manggambar pola, cara mencanting, mewarnai pola gambar, dan mambuat pewarna alami, cuman iya sebatas itu saja baru, diantara bibi dan kawan-kawan belum ada yang bisa mambuat kain batik yang gambar motifnya bagus dan akan laku untuk dijual ke masyarakat...”]

Dari pernyataan masyarakat Nagari Aie Amo dapat dilihat bahwa kegiatan pelatihan keliling atau *Mobile Training Unit* (MTU) kejuruan membatik yang diperoleh ditahun 2018 belum sepenuhnya berhasil memberikan keterampilan yang dapat digunakan untuk membuka usaha atau mendapat lapangan kerja. Bertolak belakang dengan Nagari Aie Amo pada Nagari Maloro kegiatan pelatihan keliling atau *Mobile Training Unit* (MTU) dengan kejuruan mekanik junior sepeda motor justru cukup berhasil memberikan keterampilan yang dapat digunakan untuk membuka usaha atau mendapat lapangan kerja, sebagaimana yang diungkapkan Wali nagari Maloro berikut:<sup>13</sup>

*“...Alhamdulillah berkat dapek kegiatan pelatihan keliling dari UPTD BLK Kabupaten Sijunjung di tahun 2018 itu beberapa anak muda kami pada akhirnya berhasil memperoleh kerja dan bahkan 1 orang diantara lulusannya pelatihan kemarin itu ada yang buka usaha bengkel di nagari...”*

*“...Alhamdulillah berkat memperoleh kegiatan pelatihan keliling dari UPTD BLK Kabupaten Sijunjung di tahun 2018 itu beberapa anak muda kami pada akhirnya berhasil memperoleh kerja dan*

<sup>13</sup> Wawancara dengan Alin Wali Nagari Maloro tahun 2018, pada sabtu 21 September 2019



bahkan 1 orang diantara lulusannya pelatihan kemarin itu ada yang buka usaha bengkel di *nagari* (desa)...”

Berdasarkan tinjauan peneliti saat survei awal dilapangan memang kegiatan pelatihan kejuruan mekanik junior sepeda motor Nagari Maloro cukup berhasil memberikan keterampilan yang dapat digunakan lulusannya untuk membuka usaha atau mendapat lapangan kerja yang mana dari 13 orang lulusan pelatihan 7 orang diantaranya berhasil memperoleh pekerjaan dan membuka usaha sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 1.8 berikut.

**Tabel 1.8**  
**Data Kegiatan Lulusan Pelatihan Kejuruan Mekanik Junior Sepeda Motor Nagari Maloro Di November 2019**

No	Nama Peserta	Kegiatan Ekonomi Atau Pekerjaan Lulusan	
		Sebelum Pelatihan	November 2019 (Pasca Pelatihan)
1	Adan Syahputra	Pengangguran	Usaha Bengkel
2	Dodi	Pengangguran	CV.Cempaka Motor Muaro Sijunjung
3	Ipul	Pengangguran	Pengangguran
4	Boy Yendra	Pengangguran	Pengangguran
5	Dedi Saputra	Pengangguran	CV.Sentral Motor Nagari Kunangan
6	Eenggo Marfianus	Pengangguran	Adan Motor
7	Marwon Saputra	Pengangguran	CV.Cempaka Motor Muaro Sijunjung
8	Iwas	Pengangguran	Buruh Tani Harian
9	Didi Ariadi	Pengangguran	Pengangguran
10	Ade	Pengangguran	CV.Sentral Motor Nagari Kunangan
11	Darwin	Pengangguran	Pengangguran
12	Wosri Wandu	Pengangguran	Pengangguran
13	Siit	Pengangguran	CV.Cahaya Motor Sei Tambang

Sumber: Olahan peneliti, survei awal dan data UPTD BLK Kabupaten Sijunjung

Bila ditelusuri fenomena lapangan, hal yang membuat kegiatan pelatihan kejuruan mekanik junior sepeda motor Nagari Maloro cukup berhasil memberikan keterampilan yang dapat digunakan lulusannya untuk membuka usaha atau mendapat lapangan kerja adalah karena beberapa lulusan dari kegiatan pelatihan di nagari Maloro tersebut pasca kegiatan pelatihan juga berhasil memperoleh kesempatan untuk mengikuti program pemagangan dalam negeri yang diadakan oleh Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat. Dari 20 orang lulusan pelatihan BLK di tahun 2018 yang berhasil memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan pemagangan dalam negeri dari Disnakertrans Provinsi Sumatera barat, 5 orang diantaranya merupakan lulusan dari kegiatan pelatihan kejuruan mekanik junior sepeda motor Nagari Maloro, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 1.9 berikut.

**Tabel 1.9**  
**Data Peserta Program Pemagangan Dalam Negeri Dinas Nakertrans**  
**Provinsi Sumatera Barat Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2018**

Asal Pelatihan	Nama Peserta	Lokasi Saat Kegiatan Magang
<b>Kegiatan Pemagangan Kejuruan Mekanik Junior Sepeda Motor 2018:</b>		
<i>Pelatihan keliling kejuruan mekanik sepeda motor Nagari Maloro tahun 2018</i>	1. Ade	CV.Cempaka Motor Cabang Simpang Kamang
	2. Dedi Saputra	CV.Cempaka Motor Cabang Simpang Kamang
	3. Marwon Saputra	CV.Cempaka Motor Cabang Muaro Sijunjung
	4. Adan Syahputra	CV.Cempaka Motor Cabang Muaro Sijunjung
	5. Dodi	CV.Cempaka Motor Cabang Muaro Sijunjung
Pelatihan institusional kejuruan mekanik sepeda motor tahap I tahun 2018	6. Irvan Prima	CV.Cahaya Baru Sungai Tambang
Pelatihan institusional kejuruan mekanik sepeda motor tahap 2 tahun 2018	7. Herifo Suryadi	CV.Mursil Cabang Muaro Sijunjung
	8. Fauzul Azim	CV.Mursil Cabang Muaro Sijunjung
Pelatihan institusional kejuruan mekanik sepeda motor tahap 3	9. Didi Dino Afrizaldi	CV.Mursil Cabang Muaro Sijunjung

tahun 2017	10. Zaiful Gusnedi	CV.Cahaya Baru Sungai Tambang
Kegiatan Pemagangan Kejuruan Menjahit 2018:		
Pelatihan institusional kejuruan menjahit tahap I tahun 2018	1. Engla Adi Vera	Lansek Manih Konveksi
	2. Ilfi Rahmi	Lansek Manih Konveksi
	3. Rani Oktavia Safar	Lansek Manih Konveksi
	4. Desy Suryani	Lansek Manih Konveksi
	5. Rati Enggelina	Lansek Manih Konveksi
Pelatihan institusional menjahit tahap 2 tahun 2017	6. Desrika Putri	Ajo Tailor, Psr Tanjung Ampalu
	7. Weni Efrianti	Ajo Tailor, Psr Tanjung Ampalu
	8. Gusmal S Rahayu	Ajo Tailor, Psr Tanjung Ampalu
Pelatihan menjahit tahap 3 tahun 2017	9. Gusnitari	Jahit Len, Muaro Sijunjung
	10. Fika Meliza	Jahit Len, Muaro Sijunjung

Sumber: Olahan peneliti, Disnakertrans Kabupaten Sijunjung tahun 2019.

Dari tabel 1.9 diatas dapat dilihat bahwa melalui program pemagangan dalam negeri Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat di tahun 2018, 20 orang lulusan UPTD BLK pada akhirnya memperoleh kegiatan lanjutan berupa kegiatan pemagangan, yang diantaranya 5 orang peserta berasal dari kegiatan pelatihan keliling kejuruan mekanik sepeda motor nagari Maloro tahun 2018. Kegiatan lanjutan dari pelatihan yang dapat berupa pemagangan bagi lulusan pelatihan BLK itu cukup dibutuhkan keberadaannya, karena dapat membantu peserta dalam memperoleh pengalaman kerja serta dapat membantu peserta membangun relasi dengan tempat usaha dimana lulusan pelatihan BLK dimagangkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Marwon berikut:<sup>14</sup>

*“...bagi Marwon sebagai lulusan pelatihan, justru kegiatan pemagangan yang lebih teraso manfaatnya daripada kegiatan pelatihan yang diagia urang BLK, dari kegiatan pemagangan iko Marwon maraso batua-batua belajar menjadi seorang*

<sup>14</sup>Wawancara dengan Marwon lulusan kegiatan pelatihan keterampilan kejuruan mekanik sepeda motor Nagari Maloro tahun 2018. Pada jumat 8 November 2019

*mekanik sepeda motor ...lewat kegiatan pemagangan iko lo Marwon punyo hubungan akrab dengan manager di Cempaka yang akhirnya pas selesai magang menawarkan Marwon jadi mekanik tetap di Cempaka”*

[“...bagi Marwon sebagai lulusan pelatihan, justru kegiatan pemagangan yang lebih terasa manfaatnya daripada kegiatan pelatihan yang diberi oleh orang BLK, dari kegiatan pemagangan ini Marwon merasa benar-benar belajar menjadi seorang mekanik sepeda motor ...lewat kegiatan pemagangan ini juga Marwon punya hubungan akrab dengan manager di Cempaka yang akhirnya saat selesai magang ia menawarkan Marwon jadi mekanik tetap di Cempaka”]

Kegiatan lanjutan dari pelatihan juga pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat lulusan pelatihan yang lewat kegiatan pelatihan yang diikutinya baru mengenal keterampilan. Sebagaimana yang diucapkan oleh Resmalina berikut:<sup>15</sup>

*“...kalau bisa ado hendaknyo kelanjutan dari kegiatan pelatihan membatik kapatang, biar kami batua-batua pandai mambuek kain batik yang motif gambar inyo tu rancak dan benar-benar laku untuak dijual.....kalau lai dilatih sampai pandai mambuek kain batik dengan motif nan rancak itu mah, mungkin ado nan bakal menekuni usaho kain batik...”*

[“...kalau bisa ada hendaknya kelanjutan dari kegiatan pelatihan membatik kemarin, biar kami benar-benar pandai membuat kain batik yang motif gambar nya itu bagus dan benar-benar laku untuk dijual.....andai dilatih sampai pandai membuat kain batik dengan motif yang bagus itu, mungkin ada yang bakal menekuni usaha kain batik...”]

Dengan pernyataan yang disampaikan oleh Marwon dan Resmalina diatas dapat dilihat bahwa agar kegiatan pelatihan keterampilan yang diberikan oleh UPTD BLK kabupaten Sijunjung dalam pelaksanaan program PKPTK tahun 2018 ini benar-benar mendatangkan manfaat kepada masyarakat yang menjadi

<sup>15</sup> Wawancara dengan Resmalina lulusan kegiatan pelatihan keterampilan keliling kejurub membatik nagari Aie Amo tahun 2018, pada Minggu 22 September 2019



kelompok sasaran atau kelompok penerima manfaat nya. Idealnya dalam pelaksanaannya program PKPTK ini Kepala Disnakertrans mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemagangan bagi lulusan BLK berprestasi. Namun mengapa pada penyusunan pelaksanaan program PKPTK yang tertuang di RKA Disnakertrans kabupaten Sijunjung di tahun 2018 Kepala Disnakertrans selaku pejabat Pengguna Anggaran (PA) tidak memutuskan untuk mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemagangan bagi lulusan BLK berprestasi, apakah karena memang semata ingin membuat persentase jumlah tenaga kerja terlatih menjadi tinggi hingga Disnakertrans kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan program PKPTK ini memiliki kinerja (outcome) yang tinggi, dan apakah UPTD BLK dengan jumlah instruktur pelatih nya yang masih minim mampu menyelenggarakan 51 kegiatan paket pelatihan dengan baik hingga mendatangkan manfaat kepada kelompok penerima manfaat (kelompok sasaran) nya, pernyataan ini lah yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian berkenaan pelaksanaan program PKPTK ini.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang dilaksanakan di Kabupaten Sijunjung tahun 2018?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : Untuk mendeskripsikan implementasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh



Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung dan UPTD BLK Kabupaten Sijunjung ditahun 2018

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan Administrasi Publik, karena dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian tentang Administrasi Publik terutama pada konsentrasi kebijakan publik, yaitu tentang proses implementasi kebijakan pemerintah khususnya tentang kebijakan dalam upaya mengurangi angka pengangguran.
- b. Selain itu, manfaat penelitian ini juga berfungsi sebagai bahan referensi atau acuan bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti permasalahan yang terkait dengan tema penelitian ini. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka penyempurnaan konsep maupun implementasi untuk meningkatkan pengetahuan-pengetahuan bagaimana proses sebuah kebijakan publik terutama pada tahap implementasi kebijakan.

##### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti sehingga dapat membantu peneliti dalam melakukan pembahasan dan pemecahan masalah yang peneliti angkat. Selain

itu juga memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK) yang di lakukan oleh Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung, dan hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat atau masukan bagi pelaksanaan pembangunan dalam hal teknis pada umumnya, kegiatan dibidang Administrasi, dan Ketenagakerjaan pada khususnya

- b. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung dan UPTD BLK Kabupaten Sijunjung agar pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK) menjadi lebih baik ditahun berikutnya.

